

## **Pemetaan Administrasi Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dan GIS: Studi Kasus Desa Salarri, Kabupaten Polewali Mandar**

**Ellyni Dwi Fortuna<sup>1</sup>, Alif<sup>2</sup>, Noor Ahmad Hasby<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Universitas Sulawesi Barat, Indonesia*

Received : 22 April 2025, Revised : 24 April 2025, Published : 3 Juni 2025

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Ellyni Dwi Fortuna

E-mail: [ellynidwifortuna@unsulbar.ac.id](mailto:ellynidwifortuna@unsulbar.ac.id)

### **Abstrak**

*Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun peta administrasi Desa Salarri sebagai upaya mendukung pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah pemetaan partisipatif, yang melibatkan observasi awal, sosialisasi, survei lapangan, analisis data spasial, serta validasi bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Hasil yang diperoleh berupa peta administrasi yang menggambarkan batas desa secara lebih jelas dan telah disepakati oleh pihak terkait. Peta ini diharapkan dapat menjadi acuan resmi dalam pengelolaan aset desa, perencanaan pembangunan, serta mencegah potensi konflik batas wilayah. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini, meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan persepsi batas desa dan keterbatasan teknologi pemetaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, disarankan adanya sosialisasi intensif sebelum pemetaan serta pemanfaatan teknologi seperti GPS dan sistem informasi geografis (SIG) untuk meningkatkan akurasi. Dengan adanya peta administrasi ini, desa memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan dalam tata kelola wilayah, penyusunan kebijakan, dan pengajuan program pembangunan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.*

**Kata kunci** – administrasi wilayah desa, perencanaan pembangunan desa, pemetaan batas wilayah, pemetaan partisipatif, geospasial desa

### **Abstrak**

*This study aims to develop an administrative map of Salarri Village as a strategic effort to support territorial management and sustainable village development planning. The method used is participatory mapping, involving initial observation, socialization, field surveys, spatial data analysis, and validation with the village government and community leaders. The result is an administrative map that clearly delineates village boundaries and has been agreed upon by relevant stakeholders. This map is expected to serve as an official reference for asset management, development planning, and prevention of potential boundary conflicts. Active community participation is a key factor in the success of this program, although challenges such as differing perceptions of village boundaries and limited mapping technology were encountered. To address these challenges, intensive socialization prior to mapping and the use of technologies such as GPS and Geographic Information Systems (GIS) are recommended to improve accuracy. With the availability of this administrative map, the village now possesses an official document that can be used for spatial governance, policy formulation, and submitting development programs to higher levels of government.*

**Keywords** - village administrative boundaries, village development planning, boundary mapping, participatory mapping, village geospatial data.

**How To Cite :** Fortuna, E. D., Alif, A., & Hasby, N. A. (2025). Pemetaan Administrasi Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dan GIS: Studi Kasus Desa Salarri, Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 172–178. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.131>  
Copyright ©2025 Ellyni Dwi Fortuna, Alif Alif, Noor Ahmad Hasby

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



## **PENDAHULUAN**

Pemetaan administrasi desa merupakan aspek fundamental dalam tata kelola wilayah yang efektif dan perencanaan pembangunan berkelanjutan (Haraty et al., 2024; Yuliyanto et al., 2022). Keberadaan peta administrasi yang akurat dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, merencanakan infrastruktur, serta mencegah potensi sengketa batas wilayah (Kilic et al., 2023; Syahza et al., 2020). Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan analisis spasial yang lebih komprehensif dalam menentukan batas administratif dan mendukung perencanaan desa berbasis data (Setyawan et al., 2018; Singh & Chudasama, 2023). Selain itu, integrasi GIS dengan metode pemetaan partisipatif dapat meningkatkan akurasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan (Zachrisson et al., 2021; Zarodi et al., 2019). Pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010. Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat dianggap sebagai kontrol sosial sekaligus bentuk kemitraan antara pemerintah dan warga untuk menciptakan ruang yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Rohiani, 2021; Sinaga, 2020). Prinsip keterbukaan, kebersamaan, dan keberlanjutan menjadi dasar hukum yang penting dalam upaya perencanaan berbasis masyarakat.

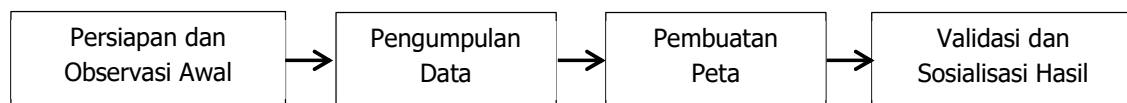
Desa Salarri, yang terletak di Kelurahan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, menghadapi permasalahan dalam administrasi wilayahnya akibat ketiadaan peta batas administratif yang terdokumentasi secara resmi. Berdasarkan hasil observasi awal bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat, batas desa hanya diketahui secara turun-temurun tanpa adanya dokumen pendukung. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan aset desa, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan (M. R. Li et al., 2023).

Pemetaan partisipatif menjadi pendekatan yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini, karena melibatkan masyarakat setempat yang memiliki pemahaman historis mengenai batas desa (Setyawan et al., 2018). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keakuratan data, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap peta yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kemungkinan pemanfaatannya dalam jangka panjang (Martínez-López et al., 2024; Rendra et al., 2024). Teknologi pemetaan seperti GPS dan drone juga dapat meningkatkan akurasi hasil serta mempercepat validasi batas wilayah (T. Li et al., 2025; Syamsiar et al., n.d.). Tantangan utama dalam proses pemetaan ini mencakup perbedaan persepsi mengenai batas wilayah antar-masyarakat serta keterbatasan akses terhadap teknologi pemetaan yang lebih canggih (Gohil et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang mengombinasikan metode pemetaan konvensional dengan pemanfaatan teknologi modern seperti GPS dan Sistem Informasi Geografis (SIG) (Cao et al., 2025; Paramitha Mahanani et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta administrasi Desa Salarri dengan menggunakan pendekatan pemetaan partisipatif berbasis GIS. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi acuan resmi bagi pemerintah desa dalam pengelolaan wilayah, administrasi kependudukan, serta dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terstruktur dan berbasis data (Handoko et al., 2021; Poerbo et al., 2021; Singh & Chudasama, 2023).

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat tahapan utama yaitu persiapan dan observasi awal, pengumpulan data, pembuatan peta, validasi dan sosialisasi hasil.



**Gambar 1.** Tahapan Kegiatan Pengabdian

Tahap pertama adalah observasi awal yang dilakukan dengan mendatangi lokasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat serta pemerintah desa untuk mengetahui kondisi eksisting terkait batas administratif desa. Observasi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman tentang batas desa dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan dalam proses

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pemetaan.

Tahap kedua adalah pengumpulan data yang meliputi data spasial dan data administratif. Data spasial diperoleh melalui teknik pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai batas desa. Selain itu, dilakukan survei menggunakan perangkat GPS untuk memperoleh koordinat batas desa secara lebih akurat. Data administratif dikumpulkan dari dokumen resmi desa serta wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Tahap ketiga adalah pembuatan peta administrasi desa. Data yang telah diperoleh dianalisis dan diproses menggunakan perangkat lunak pemetaan seperti ArcGIS atau QGIS. Dalam tahap ini, dilakukan digitasi batas desa serta penyusunan informasi tambahan yang relevan seperti jalan, sungai, dan batas wilayah administratif lainnya.

Tahap keempat adalah validasi hasil peta. Peta yang telah dibuat divalidasi dengan cara melakukan diskusi kembali bersama masyarakat dan pemerintah desa untuk memastikan bahwa batas yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan revisi sebelum finalisasi peta.

Tahap terakhir adalah sosialisasi hasil kepada masyarakat dan pemerintah desa. Peta administrasi yang telah disusun diserahkan kepada pihak desa sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan dalam tata kelola wilayah. Selain itu, dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat peta administrasi dan cara penggunaannya dalam perencanaan pembangunan desa.

Dengan metode ini, diharapkan peta administrasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan resmi bagi Desa Salarri dan membantu dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya desa secara lebih baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari kegiatan ini berupa peta administrasi Desa Salarri yang telah disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui metode pemetaan partisipatif. Peta ini menunjukkan batas administratif desa secara lebih jelas dan telah melalui proses validasi bersama tokoh masyarakat serta pemerintah desa. Dengan adanya peta ini, pemerintah desa kini memiliki acuan resmi dalam pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan.

Proses kegiatan ini diawali dengan observasi awal yang dilaksanakan pada 6–10 Agustus 2024. Observasi ini melibatkan diskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk memahami kondisi batas administratif desa yang belum terdokumentasi secara resmi. Dari hasil diskusi, diketahui bahwa meskipun beberapa tokoh masyarakat memiliki pemahaman tentang batas desa, tidak ada dokumen yang secara visual menunjukkan batas wilayah secara akurat. Oleh karena itu, pemetaan administrasi desa dianggap penting untuk memperjelas batas wilayah serta mencegah potensi sengketa lahan di masa mendatang.



**Gambar 2.** Persiapan dan Observasi

Setelah tahap observasi, dilakukan sosialisasi penyampaian program pada 16 Desember 2024. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat peta administrasi desa dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembuatannya.

Pemerintah desa dan tokoh masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini karena dianggap dapat membantu dalam berbagai aspek perencanaan desa, termasuk pembangunan infrastruktur dan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan utama berlangsung dari 17 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Tahapan ini mencakup pengumpulan data, survei lapangan, analisis spasial, serta pembuatan peta administrasi desa. Dalam pelaksanaannya, tim KKN bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pemetaan partisipatif. Metode ini memastikan bahwa batas desa yang digambarkan sesuai dengan pengetahuan lokal dan kenyataan di lapangan. Selain itu, masyarakat setempat turut membantu dalam mengidentifikasi titik-titik batas wilayah berdasarkan pengetahuan historis mereka.



**Gambar 3.** Pembuatan Peta

Setelah peta administrasi selesai disusun, dilakukan proses validasi yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Validasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi peta sebelum dijadikan dokumen resmi. Revisi dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat dan pemerintah desa hingga diperoleh peta yang benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Akhirnya, pada 13 Januari 2025, peta administrasi resmi diserahkan kepada pemerintah desa dalam sebuah acara seremonial yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Dengan penyerahan ini, peta administrasi resmi menjadi dokumen yang dapat digunakan dalam berbagai aspek tata kelola desa, termasuk sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan pembangunan desa.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, pembuatan peta administrasi ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan keteraturan administratif desa. Pemerintah desa kini memiliki dokumen yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk dalam penataan wilayah, administrasi kependudukan, serta pengajuan program pembangunan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, evaluasi juga menunjukkan bahwa metode pemetaan partisipatif yang diterapkan sangat efektif, karena melibatkan masyarakat secara langsung dan menghasilkan peta yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Tantangan seperti perbedaan persepsi batas desa dapat diminimalkan melalui diskusi yang melibatkan banyak pihak, sehingga peta yang dihasilkan mendapatkan kesepakatan bersama.



**Gambar 4.** Validasi dan Penyerahan Peta

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan program. Masyarakat, terutama tokoh masyarakat yang memahami batas wilayah desa, berkontribusi secara langsung dalam memberikan informasi terkait batas administratif yang sebelumnya belum terdokumentasi secara resmi. Tanpa keterlibatan masyarakat, data yang diperoleh tidak akan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, mengingat banyak batas desa hanya diketahui berdasarkan pengetahuan turun-temurun.

Pemerintah desa juga turut berperan dengan memberikan akses terhadap dokumen-dokumen administratif yang dapat membantu dalam proses pemetaan. Selain itu, mereka juga membantu dalam memfasilitasi pertemuan antara tim KKN dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan dapat divalidasi dengan baik. Keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa metode pemetaan partisipatif sangat efektif dalam menggambarkan batas administratif desa secara lebih akurat dan dapat diterapkan di desa-desa lain yang mengalami permasalahan serupa.

Selain aspek teknis, program ini juga memberikan dampak sosial yang positif. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemetaan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya batas administratif yang jelas. Dengan demikian, masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap peta yang telah dibuat, sehingga kemungkinan besar peta ini akan digunakan secara berkelanjutan dalam berbagai keperluan administrasi desa.

Namun, dalam proses pembuatan peta ini terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perbedaan persepsi di antara masyarakat mengenai batas desa, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam hasil pemetaan. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi pemetaan yang lebih akurat, sehingga sebagian besar pemetaan masih mengandalkan metode manual yang memerlukan validasi lebih lanjut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif sebelum pemetaan dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang batas administratif desa. Selain itu, penggunaan teknologi pemetaan seperti GPS atau drone dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi hasil pemetaan. Pemerintah desa juga disarankan untuk melakukan pembaruan peta secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Dari perspektif akademik, pelaksanaan program ini juga membuktikan bahwa metode pemetaan partisipatif dapat menjadi solusi bagi desa-desa yang belum memiliki peta administrasi. Dengan menggabungkan data spasial dan pengetahuan lokal, dihasilkan peta yang lebih representatif dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa yang lebih baik di masa depan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pembuatan peta administrasi Desa Salarri melalui metode pemetaan partisipatif berhasil menghasilkan dokumen batas wilayah desa yang lebih jelas dan akurat. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa, peta yang dibuat dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan wilayah, perencanaan pembangunan, dan administrasi kependudukan. Tantangan yang dihadapi dalam proses pemetaan, seperti perbedaan persepsi batas desa dan keterbatasan teknologi, dapat diatasi dengan sosialisasi yang lebih intensif serta pemanfaatan teknologi pemetaan yang lebih canggih. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pemetaan dapat menjadi solusi efektif bagi desa-desa yang belum memiliki peta administrasi, serta dapat dijadikan model bagi program serupa di wilayah lain.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sulawesi Barat atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik, Kepala Desa Salarri, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Salarri yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh selama kegiatan berlangsung.

Kami juga mengapresiasi semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kontribusi yang diberikan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Salarri, khususnya dalam pemanfaatan peta administrasi desa untuk pengelolaan wilayah dan perencanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cao, R., Tu, W., Chen, D., & Zhang, W. (2025). Mapping urban villages in China: Progress and challenges. *Computers, Environment and Urban Systems*, 119(1), 102282. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2025.102282>
- Gohil, M., Mehta, D., & Shaikh, M. (2024). An integration of geospatial and fuzzy-logic techniques for multi-hazard mapping. *Results in Engineering*, 21(December 2023), 101758. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.101758>
- Handoko, E. Y., Yuwono, Y., & Tucunan, K. P. (2021). Pemetaan Desa Menggunakan Metode Partisipatif untuk Pembangunan Desa dan Kawasan (Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur). *Sewagati*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8006>
- Haraty, S. R., Hamimu, L., Ihksan, L., Usmardin, J., & Haraty, S. R. (2024). Pembuatan Peta Administrasi Desa Amesiu untuk Penguatan Tata Kelola Wilayah dan Perencanaan Berbasis Geografis Making of Amesiu village administrative map to Strengthen Regional Governance and Geographically Based Planning. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ( JAPIMAS)* 3(2), 62–68.
- Kilic, D., Yagci, C., & Iscan, F. (2023). A GIS-based multi-criteria decision analysis approach using AHP for rural settlement site selection and eco-village design in Erzincan, Turkey. *Socio-Economic Planning Sciences*, 86(November 2022), 101478. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101478>
- Li, M. R., Cao, Y., & Li, G. W. (2023). An approach to developing and protecting linear heritage tourism: The construction of cultural heritage corridor of traditional villages in Mentougou District using GIS. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 11(4), 607–623. <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2023.11.002>
- Li, T., Feng, Q., Niu, B., Chen, B., Yan, F., Gong, J., & Liu, J. (2025). Mapping urban villages based on point-of-interest data and a deep learning approach. *Cities*, 156(2). <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105549>
- Martínez-López, J., Albaladejo, J., & de Vente, J. (2024). Participatory modelling for sustainable development: Connecting coastal and rural social-ecological systems. *Environmental Modelling and Software*, 177(March). <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2024.106061>
- Paramitha Mahanani, A., Sylvayanti, S. P., Nurdinawati, D., Heryatno, Y., Rizkillah, R., Kadir, M. A., & Korespondensi, P. (2020). Pemetaan Partisipatif melalui Transek di Desa Muktisari, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka (Participatory Mapping through Transects in Muktisari Village, Cingambul District, Majalengka Regency). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* Juni, 2020(4), 596–601.
- Poerbo, H., Suryandharu, T., & Septarian, S. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Wilayah Desa Guna Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Dusun Godhean-Desa Kucur). *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*.
- Rendra, M. I., Huda, M. M., Sandy, R. A., Rosewajid, S., Saputra, R. Y., & Abrori, A. N. (2024). Penyusunan Peta Administrasi Desa dengan Pemetaan Partisipatif Untuk Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Kabupaten Bojonegoro. *Abdimas Galuh*, 6(1), 1–8.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *In Journal of Regional and Rural Development Planning* (Vol. 5, Issue 1, pp. 15–27). <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Setyawan, D., Nugraha, A. L., & Bambang Sudar. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Geografis (Studi Kasus: Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 1–7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/22401>

- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2), 242–260.  
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta%0APenataan>
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2023). Geo-information-enabled village level micro-planning for enhancing common good. *Technological Forecasting and Social Change*, 189(January), 122336. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122336>
- Syahza, A., Galib, M., Oktarianda, R., Pengembangan, P., Informasi, I., & Riau, U. (2020). Pengembangan Peta Potensi Desa Berbasis Spasial Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. 3(3), 197–210.
- Syamsiar, N. R., Munaja, R., Saputra, A. G., Majene, K., Sirindu, K., & Wilayah, P. (n.d.). Kegiatan penyusunan peta administrasi wilayah di kelurahan sirindu, kecamatan pamboang, kabupaten majene. 43–48. <https://doi.org/10.24853/jpmt.7.1.43-48>
- Yuliyanto, E., Amelia, R., & Pradiftha Junfithrana, A. (2022). Pembuatan Peta Desa Margalaksana Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 2(2), 46–49. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v2i1.132>
- Zachrisson, A., Bjärstig, T., Thellbro, C., Neumann, W., & Svensson, J. (2021). Participatory comprehensive planning to handle competing land-use priorities in the sparsely populated rural context. *Journal of Rural Studies*, 88(October), 1–13.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.031>
- Zarodi, H., Rofi, A., Anshori, M., & Widarto, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi GIS & Penginderaan Jauh untuk Membuat Peta Batas Dusun Partisipatif di Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. *Seminar Nasional GeoTIK*, 1, 136–145.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/10806>